

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP *OUTCOMES* PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

(STUDI KASUS: PROVINSI JAWA TENGAH)

Solechah

Program Studi MIESP Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
Jalan Erlangga Tengah Nomo2 17 Semarang, Telp/Fax. (024)8442273, 8417006

ABSTRACT

Fiscal decentralization was held since 2001 is purpose to give more capacity of public service that government do for people. Implementation of the regional autonomy through fiscal decentralization is expected to improve the quality of public services. This research is purpose to see the effect of fiscal decentralization to outcomes of public service in education sector. Education Outcomes is one measure that can be used to view the quality of public services.

This research use panel data from ten residence and city in Central Java in 2007 until 2009. The method to get the result of this research is use regression analysis approach to find the effect of fiscal decentralization to output and outcome of education sector of public service.

The result of this research shows that fiscal decentralization have effect for outcome of education sector of public service. Fiscal decentralization has negatif effect and no significant to school participation rate. If fiscal decentralization increase one percent school participation rate down up to 2.364 and then pupil and teacher ratio has positif effect for school participation rate, if pupil and teacher ratio increase one percent school participation rate rise up to 1.427, but Gross Regional Domestic Product percapita has positif effect and significant for school participation rate, if Gross Regional Domestic Product percapita increase one percent school participation rate rise up to 3.563.

Keyword: fiscal decentralization, output of education sector, outcome of education sector.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memasuki tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional ke-2. Relevansi dikembangkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk memperbaiki kualitas penyediaan pelayanan publik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional. Kebijakan pemerintah ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Oates (1972) dalam teori desentralisasi (*desentralization theorem*). Dalam teori desentralisasi, dinyatakan bahwa apabila biaya penyediaan barang dan jasa publik adalah sama untuk

<http://jurnal.unimus.ac.id>

pemerintahan lokal (kabupaten/kota) dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka akan lebih efektif dan efisien apabila penyediaan tersebut diserahkan kepada pemerintah lokal.

Dalam rangka memenuhi penyediaan pelayanan publik di bidang pendidikan, pemerintah daerah telah mengalokasikan belanja pendidikan melalui belanja urusan pendidikan. Belanja urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan berhak diterima secara minimal oleh masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang SISDIKNAS 2003.

Apabila dilihat pada capaian pendidikan berupa tingkat partisipasi sekolah dimana pada tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan masih sebesar 60% dimana angka tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada kondisi tingkat putus sekolah tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Undang-undang sistem pendidikan dasar yang mengamanatkan 20% alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan belum dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pencapaian pada *outcomes* bidang pendidikan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap capaian *outcomes* pendidikan berupa angka partisipasi sekolah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Alasan utama suatu negara menerapkan prinsip desentralisasi fiskal adalah adanya pendapat bahwa pengambilan keputusan akan lebih baik apabila diserahkan kepada tingkatan pemerintah yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pemerintahan yang lebih rendah secara langsung dapat merasakan dampak dari program dan pelayanan yang direncanakan oleh pemerintah sebagaimana dalam teori desentralisasi (*desentralization theorem*) yang dikemukakan oleh Oates dalam Lev Freinkman (2010), bahwa :

“ local governments may have superior knowledge of local preferences and needs and thus can be able to target public spending better “.

Teori ini mengandung arti bahwa, pemerintah lokal lebih mengetahui preferensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga apabila biaya penyediaan barang dan jasa publik adalah sama untuk pemerintahan lokal (kabupaten/kota) dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,

maka akan lebih efektif dan efisien apabila penyediaan tersebut diserahkan kepada pemerintah lokal.

Beberapa penelitian mengatakan bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dan pengalokasian anggaran, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dengan baik di sediakan oleh pemerintah. Namun dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa desentralisasi fiskal yang dapat meningkatkan efisiensi anggaran itu hanya berjalan pada negara-negara yang telah maju. Sedangkan dalam kasus negara-negara berkembang hal tersebut belum terjadi dengan baik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membuktikan argumen mengenai desentralisasi di negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai parameter tingkat kemajuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat dilihat melalui indikator kinerja pemerintah daerah yaitu melalui angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan menengah. Kondisi ini akan menunjukkan sejauhmana respon positif pemerintah daerah yang dapat dilihat dari alokasi belanja urusan pendidikan dapat terserap oleh masyarakat dalam bentuk *output* dan *outcome* bidang pendidikan khususnya angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan menengah.

Desentralisasi fiskal berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan antara lain Zhang dan Zou (1996), Robalino (2001), Martinez dan McNab (2006), dan Uchimura (2007) dapat diukur melalui total penerimaan pemerintah kabupaten/kota terhadap total penerimaan pemerintah provinsi dan total pengeluaran pemerintah kabupaten/kota terhadap total pengeluaran pemerintah provinsi.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini terlihat adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pengeluaran pemerintah dan *outcome* pada bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain bahwa adanya desentralisasi fiskal ini mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan preferensi masyarakat. Berdasarkan teori peneliti ingin membuktikan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal di Jawa Tengah terhadap *outcome* pada bidang pendidikan.

Hubungan Desentralisasi Fiskal Dengan *Outcomes* Bidang Pendidikan

Hubungan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam memberikan *outcome* di bidang pendidikan telah dilakukan oleh Jean-Paul Faguet dan Fabio Sánchez (2006) yang menghasilkan temuan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah belanja pemerintah bidang

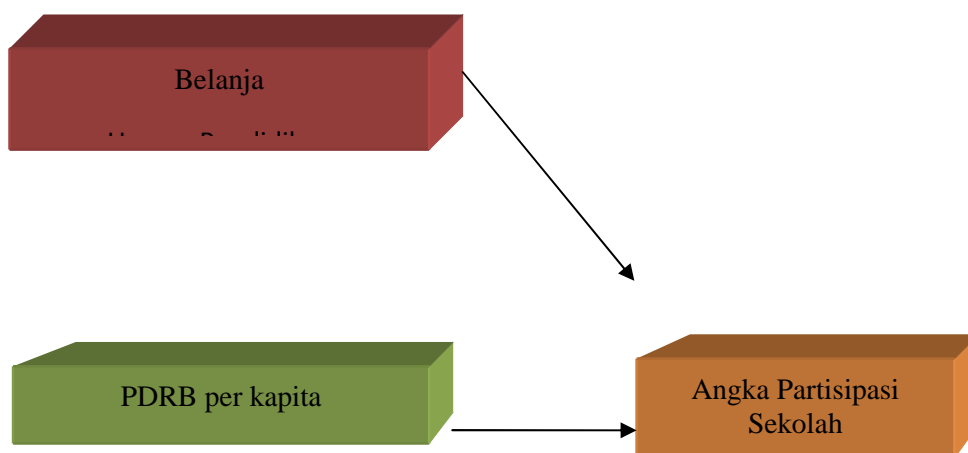
pendidikan terhadap *outcomes* bidang pendidikan yakni angka partisipasi sekolah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah yang di keluarkan oleh pemerintah pada bidang pendidikan ini maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Canterero et al (2008) di Spanyol diperoleh hasil bahwa pendapatan per kapita, desentralisasi dan sumber daya kesehatan memiliki pengaruh penting terhadap kematian bayi dan usia harapan hidup. Angka kematian bayi dan usia harapan hidup berhubungan dengan pendapatan per kapita, desentralisasi pelayanan kesehatan, dan jumlah dokter umum. Dengan mengacu pada penelitian tersebut maka digunakanlah variabel PDRB per kapita sebagai bagian yang menentukan besarnya hasil atau *outcome* yang ingin di capai untuk sektor pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jean-Paul Faguet dan Fabio Sánchez (2006) dan Salinas Paula, Pena (2007) dengan mengambil studi kasus negara Bolivia serta Spanyol mengungkapkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara rasio murid per guru untuk menggambarkan bagaimana ketersediaan guru di suatu daerah dengan tingkat partisipasi sekolah mempunyai hubungan yang positif yang berarti dengan tersedianya guru di suatu daerah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, secara sistematis hubungan antara desentralisasi fiskal dengan outcome angka partisipasi sekolah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis



Hipotesis

Berdasarkan pada teori, studi terdahulu serta laporan dari pemerintah, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis 1

Ho : Diduga tidak ada pengaruh desentralisasi fiskal dengan angka partisipasi sekolah.

Ha : Diduga ada pengaruh desentralisasi fiskal dengan angka partisipasi sekolah.

2. Hipotesis 2

Ho : Diduga tidak ada pengaruh PDRB perkapita dengan angka partisipasi sekolah.

Ha : Diduga ada pengaruh PDRB perkapita dengan angka partisipasi sekolah.

3. Hipotesis 3

Ho : Diduga tidak ada pengaruh rasio murid dan guru dengan angka partisipasi sekolah.

Ha : Diduga ada pengaruh rasio murid dan guru dengan angka partisipasi sekolah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa angka partisipasi sekolah SMA/SMK pada tahun ajaran tertentu dalam suatu wilayah sebagai hasil *outcome* pengeluaran pemerintah pada urusan pendidikan. Sedangkan variabel independen terdiri dari variabel desentralisasi fiskal yang diukur dengan menggunakan indikator realisasi pengeluaran, yaitu merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap pemerintah provinsi. Indikator ini juga digunakan dalam penelitian Zhang dan Zou (1996), Robalino (2001) dan Uchimura (2007). Variabel independen selanjutnya adalah PDRB yang digunakan ialah PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku, agar data PDRB dapat mencerminkan pendapatan kotor masyarakat yang sesungguhnya karena telah memasukkan unsur inflasi di

dalamnya. Variabel independen yang ketiga adalah rasio murid per guru merupakan rasio antara jumlah murid yang terdaftar di suatu tingkat pendidikan menengah pada tahun ajaran tertentu dengan jumlah guru yang terdaftar di suatu tingkat pendidikan menengah pada tahun ajaran tertentu. Rasio murid per guru untuk menggambarkan tingkat kapasitas guru yang tersedia untuk memberikan pendidikan kepada siswa.

Data yang digunakan adalah data pada tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki 6 kota dan 29 kabupaten dengan mengambil tahun penelitian selama tiga tahun yaitu tahun 2007-2009.

Metode Analisis

Studi ini menggunakan analisis data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 16. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara *time-series data* dan *cross-section data* (Gujarati, 2009). Data yang digunakan adalah data *time series* selama 3 tahun yakni tahun 2007-2009 dan data *cross section* sebanyak 10 data yang mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil dari kombinasi data *time series* dan *cross section* menghasilkan 30 observasi.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hipotesis, maka persamaan struktural yang dibangun dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda dengan metode OLS adalah sebagai berikut :

$$APSi = \alpha_0 + \alpha_1 DF_i + \alpha_2 PDRBC_i + \alpha_3 MDG_i + e_i$$

Dimana :

DF : Desentralisasi fiskal yakni rasio realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah provinsi.

PDRBC : Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berdasarkan harga yang berlaku.

MDG : Menggambarkan rasio murid per guru.

e : Error

i : Melambangkan waktu dari tahun 2007-2009

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

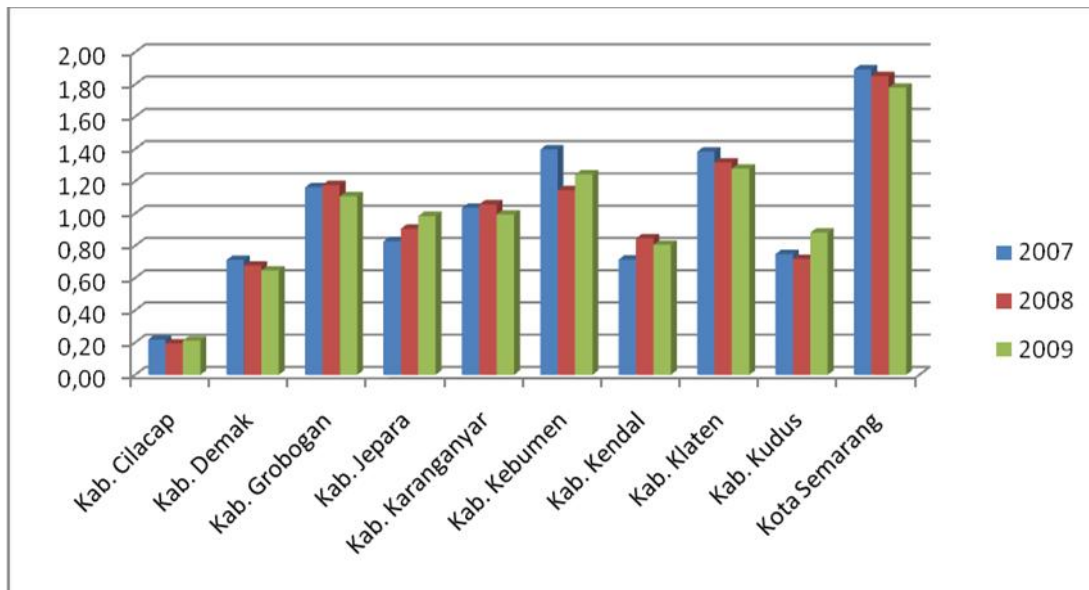
Desentralisasi Fiskal

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Desentralisasi berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan bagaimana masing-masing tingkatan pemerintah berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam masalah fiskal, sehingga prinsip kebijakan perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip ini lebih dikenal dengan istilah *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Pelaksanaan fungsi pada masing-masing tingkatan pemerintah daerah yang diikuti dengan pendanaan dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah sebagaimana tertuang pada Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.

Gambar 2. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari Sisi Pengeluaran



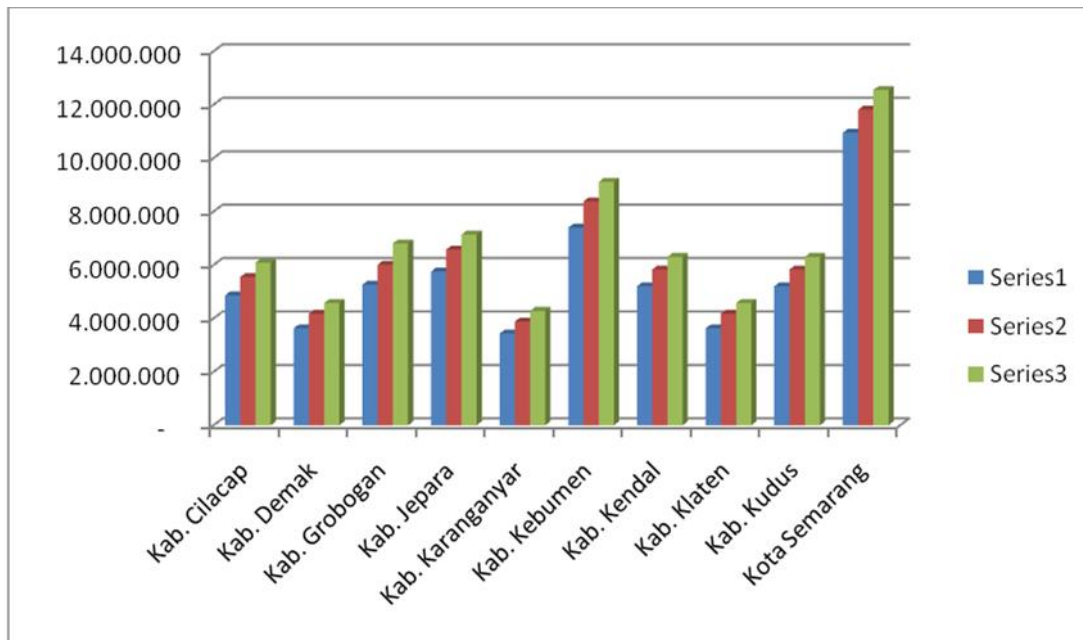
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 2 menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal yang beragam antar kabupaten/kota. Kondisi ini mengindikasikan bahwa derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di lihat dari sisi pengeluaran di Provinsi Jawa Tengah cenderung beragam dan fluktuatif. Namun di sisi lain, desentralisasi fiskal diharapkan meningkat secara terus menerus dalam urusan pendidikan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PDRB per Kapita

PDRB perkapita merupakan perwujudan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah per tahun perkepala keluarga. Dalam hal penelitian ini PDRB perkapita yang digunakan adalah pendapatan regional bruto dengan harga berlaku dengan tujuan untuk melihat bagaimana kondisi pendapatan kotor masyarakat setelah terkena inflasi dan lain-lain. PDRB perkapita 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 3.

Gambar 3. PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009
(Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik,diolah.

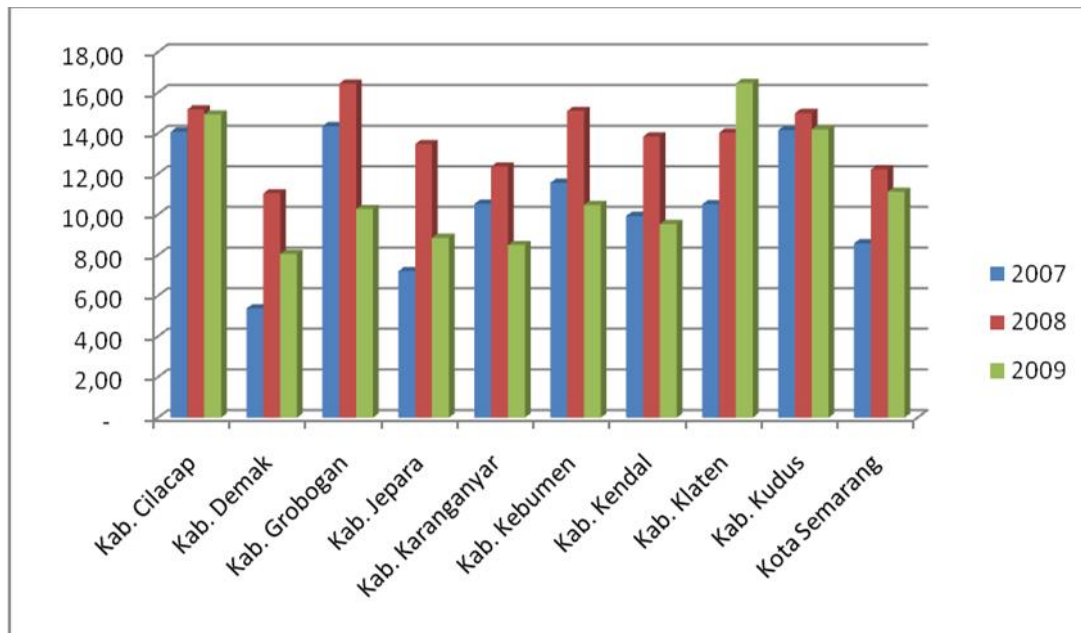
Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa tingkat PDRB per kapita masyarakat di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan atau peningkatan tiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat setiap tahun selalu meningkat. Namun demikian, apabila dibandingkan antar kabupaten/kota cenderung terjadi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kota Semarang menunjukkan jumlah pendapatan masyarakat yang cukup tinggi dibandingkan dengan 9 kabupaten lainnya.

Rasio Murid Per Guru SMA/SMK

Rasio murid per guru merupakan salah satu indikator untuk menilai kemajuan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Tersedianya guru merupakan penyediaan sarana publik yang wajib disediakan oleh kabupaten/kota dan merupakan input di bidang pendidikan. Sebagai input pendidikan, tersedianya guru berperan sebagai pendidik yang menentukan bagaimana kualitas murid dan *output* pendidikan lain baik dari segi akademis dan non akademis. Gambar 4 menunjukkan kondisi murid per guru pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan kejuruan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009.

Gambar 4. Rasio Murid Per Guru Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2007-2009



Sumber : Badan Pusat Statistik,diolah.

Data pada Gambar 4 diatas menggambarkan data mengenai rasio jumlah murid per guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penyediaan guru per murid secara minimal yang harus disediakan oleh kabupaten/kota adalah 11 murid per guru. Pada Tahun 2008 capaian kinerja dalam memenuhi pelayanan minimal di bidang pendidikan telah tercapai, namun demikian pada Tahun 2009 rasio murid per guru rata-rata terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik dengan SPSS 16

Menurut Gujarati dalam Ghozali (2005), ada 11 (sebelas) asumsi yang mendasari model regresi lineaar klasik (*Classical Linear Regression Model*) yang harus dipenuhi dalam metode OLS, yaitu antara lain :

1. Model regresi linier, artinya linier dalam parameter sebagaimana dalam persamaan $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i$.
2. Nilai X diasumsikan non-stokastik, artinya nilai X dianggap tetap untuk dalam sampel yang berulang.
3. Nilai rata-rata kesalahan μ_i adalah nol atau $E(\mu_i/X_i)=0$.
4. Homoskedastisitas, artinya bahwa varian kesalahan sama untuk setiap periode dan dinyatakan dalam bentuk matematis, $Var(\mu_i/X_i)= \sigma^2$.

5. Tidak ada autokorelasi antar kesalahan (antara μ_i dan μ_j tidak ada korelasi) atau secara matematis dapat ditulis, $Cov(\mu_i, \mu_j/X_i, X_j)=0$.
6. Antara μ_i dan X_i saling bebas, sehingga secara matematis dapat ditulis, $Cov(\mu_i/X_i)=0$.
7. Jumlah observasi, n harus lebih besar dari jumlah parameter yang diestimasi (jumlah variabel bebas).
8. Adanya variabilitas dalam nilai X_i , artinya nilai X_i harus berbeda.
9. Model regresi telah dispesifikasi secara benar, artinya tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik.
10. Tidak ada Multikolinieritas yang sempurna antarvariabel bebas.
11. Nilai kesalahan μ_i terdistribusi secara normal atau $\mu_i \sim N(0, \sigma^2)$.

Menurut Ghozali (2005), apabila kesebelas asumsi klasik terpenuhi, maka menurut teori Gauss-Markov metode estimasi OLS akan menghasilkan *unbiased linier estimator* dan memiliki varian minimum atau yang sering disebut *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Kesebelas asumsi tersebut terkait dengan masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, normalitas, dan linearitas. Jika semua asumsi terpenuhi, maka akan menghasilkan estimator yang linier, tidak bias dan mempunyai varian yang minimum atau *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Demikian juga dalam penelitian ini, penggunaan model regresi berganda dengan program SPSS 16.0 mengharuskan model regresi untuk memenuhi 5 (lima) asumsi dasar yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, normalitas, dan linearitas.

Uji Goodness of Fit

Menurut Ghozali (2005), ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*. Secara statistik *fit* atau tidaknya suatu model regresi dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 tidak dapat ditolak. Hasil perhitungan goodness of fit dari model dalam penelitian ini adalah sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631 ^a	.399	.329	11.46068

a. Predictors: (Constant), MDG, PDRBC, DF

Pada Tabel 1 menunjukkan tampilan output SPSS 16, model summary menunjukkan besarnya Adjuster R² sebesar 0.329. Hal ini mengandung arti bahwa 32,9% angka partisipasi sekolah dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, yaitu desentralisasi fiskal, PDRB perkapita, dan rasio guru per murid, sedangkan 67,1% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Standar Error of Estimate (SEE) sebesar 11.46068, menunjukkan makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam mengestimasi variabel dependen.

Adapun uji signifikansi simultan (uji statistik F) pada model regresi dalam penelitian ini menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji signifikansi simultan dalam penelitian ini adalah sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2264.732	3	754.911	5.747	.004 ^a
	Residual	3415.028	26	131.347		
	Total	5679.760	29			

a. Predictors: (Constant), MDG, PDRBC, DF

b. Dependent Variable: APS

Berdasar Tabel 2 tampilan output SPSS 16 menunjukkan uji ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 5.747 dengan probabilitas 0.004. Oleh karena probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi desentralisasi fiskal, PDRB perkapita, dan rasio murid dan guru tidak sama dengan nol, artinya ketiga variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap angka partisipasi sekolah. Hal ini juga berarti koefisien determinasi R^2 tidak sama dengan nol atau signifikan.

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), menurut Ghozali (2005) dinyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Tabel 3 menunjukkan tampilan output SPSS uji statistik t sebagai berikut :

Tabel 3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-14.371	11.048		-1.301	.205
DF	-2.364	5.887	-.074	-.402	.691
PDRBC	3.563	1.102	.597	3.234	.003
MDG	1.427	.737	.296	1.936	.064

a. Dependent Variable: APS

Tabel 3 pada tampilan output SPSS uji statistik t menunjukkan bahwa dari ketiga independen yang dimasukkan dalam model regresi ternyata hanya PDRB perkapita yang signifikan sedangkan desentralisasi fiskal dan rasio guru dan murid tidak signifikan terlihat nilai probabilitas di atas 0.05. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uji statistik t angka partisipasi sekolah dipengaruhi oleh pendapatan perkapita masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap outcome bidang pendidikan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dihasilkan sebagaimana pada Tabel 2 desentralisasi fiskal, pendapatan perkapita, dan rasio guru dan

murid berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Namun demikian, berdasarkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan rasio murid dan guru tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah, sedangkan PDRB perkapita yang merupakan pendapatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Koefisien regresi desentralisasi fiskal sebesar -2.364 menyatakan bahwa kenaikan satu satuan desentralisasi fiskal akan menurunkan angka partisipasi sekolah sebesar 2.364. Koefisien regresi pendapatan perkapita sebesar 3.563 menyatakan bahwa kenaikan satu satuan pendapatan perkapita akan menaikkan angka partisipasi sekolah sebesar 3.563. Demikian juga dengan koefisien regresi rasio murid dan guru sebesar 1.427 menyatakan bahwa kenaikan satu satuan rasio murid dan guru akan menaikkan angka partisipasi sekolah sebesar 1.427.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, di dapat bahwa desentralisasi fiskal yang dihitung berdasarkan rasio total pengeluaran kabupaten/kota terhadap total pengeluaran provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan angka partisipasi sekolah, pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah, sedangkan rasio murid dan guru berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu digunakan proksi lain terhadap *outcomes* bidang pendidikan seperti angka melek huruf, angka putus sekolah. Berdasarkan hasil estimasi yang didapat, maka dapat disarankan agar pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga angka partisipasi sekolah pada tingkat menengah juga meningkat.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2007 s/d 2009, *Jawa Tengah Dalam*

Angka 2007-2010, Penerbit BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang.

Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill, Inc.

Guritno, Mangkoesoebroto. 1999. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. BPFE

Impres Nomor 3 Tahun 20010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Jorce Martinez-Vazquez dan Robert M.MCNab. 2006. *Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth*. Hacienda Publica Espanola/Revista de Economia Publica,179-(4/2006):25-49.

Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mulyana,et.al, 2006, *Keuangan Daerah Persepektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Penerbit Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sukirno, Sadono, 2000, *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Alih Bahasa : Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar, Erlangga, Jakarta

Uchimura, H., Jütting, J. 2009. “*Fiscal decentralization, Chinese style: good for health outcomes*”. *World Development*, 37 (12), 1924-1936.

Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

<http://jurnal.unimus.ac.id>

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.